



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 20 Mei 2026

Halaman: 2

TERAS

Geliat Tanpa Gerai

PEMERINTAH Kota Yogyakarta lewat pemdepanan Koordinator Kelurahan Merah Putih (KKMP) siap kipuk belum memiliki gerai permanen akibat keterbatasan lahan. Bahkan puluhan koperasi kelurahan ini telah menyiapkan lahan sebelum Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani rancangan Peraturan Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai peraturan daerah pekan lalu.

Di Kota Yogyakarta, optimisme ini ditunjukkan secara konkret melalui produksi batik. Yogyakarta, Sentra batik seperti KKMP Gunungkidul membuktikan kemampuannya dengan sukses memusnahkan 6.500 seragam bagi aparaturnya sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Keberhasilan ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan seragam kedarifatan, tetapi juga menjadi jampitan nilai status Yogyakarta sebagai Kota Batik dunia yang diakui oleh UNESCO.

Kebijakan untuk mengarahkan pasar seragam sekolah berikutnya kepada 65.000 pelajar merupakan strategi untuk membaridibayarkan seragam lokal yang mampu memproduksi batik cap dalam skala. Dengan menciptakan ekosistem pasar yang pasti dan berkeslanjutan, pemerintah daerah tidak hanya menginspirasi berlanjutan pendapatan para perajin, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal sejak usia dini.

Namun, tantangan keterbatasan ruang di perkotaan tetap menuntut solusi jangka panjang yang integratif. Dukungan pihak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang memberikan pialan (hak penggunaan lahan) seluas 3.000 meter persegi di wilayah Umbulharjo menjadi angin segar yang harus dimanfaatkan secara optimal. Rencana ekolaborasi yang tidak hanya untuk gerai batik KKMP, melainkan juga dikombinasikan dengan budidaya lele bioflok serta program integrated farming, menunjukkan visi pemanfaatan ruang yang modern.

Diversifikasi usaha yang mulai menyentuh penyediaan bahan pokok, layanan kesehatan, Laku Pandai, hingga kemitraan dengan sektor perikanan dan peternakan juga untuk program Makan Bergizi Gratis, harus dikawal dengan manajemen yang akurat. Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta memikul tanggung jawab untuk memastikan sisa kelurahan yang belum aktif segera menyusui jajak 32 kelurahan lainnya. Konsistensi produksi, perluasan pasar, dan integrasi hulu-hilir ini dapat terduga, agar KKMP di Kota Yogyakarta dapat berdaya saing di tengah keterbatasan lahan. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005